



**PENGARUH KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN  
KEUANGAN PADA SELURUH DINAS  
DI KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

**YUNIATI SALSALINA**

NPM 1515100341

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2020**

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan pada seluruh dinas di kabupaten langkat baik secara parsial maupun simultan. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dinas di kabupaten langkat yang berjumlah 19 Dinas. Sampel dalam penelitian ini adalah kasubag keuangan dan bendahara pada tiap dinas di Kabupaten Langkat. Metode pengumpulan data adalah penyebaran kuisisioner. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten langkat, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten langkat. Kemudian kualitas sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten langkat.

Kata Kunci: Kualitas sumber daya manusia, Sistem pengendalian intern pemerintah, Nilai informasi, Pelaporan keuangan pemerintah daerah

## ABSTRACT

---

*This study was aimed at finding out the effect of human resources quality and internal control systems on value information in the regional government financial statements both partially or simultaneously. This study belongs to quantitative research. The population consisted in this study was all offices in Langkat regency with the total number of 19 Dinas. The sample in this study was the head of the treasury and treasurer of each department in Langkat Regency. The data collection technique was questionnaire. The data analysis use multiple regression and t-test. The results showed that the quality of human resources had no effect on the value of financial reporting information, internal control system had a positive and significant on value of financial reporting information. and then the quality of human resources, and the government's internal control system have a positive and significant effect simultaneously on the value of financial reporting information in all offices in Langkat Regency.*

*Keywords: Human resource quality, internal control system, information value, region's government financial report*

# DAFTAR ISI

## Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Peneletian.....	7
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori .....	9
1. Otonomi Daerah.....	9
2. Bentuk Umum Pemerintahan.....	11
3. Entitas Pelaporan .....	12
4. Pelaporan Keuangan Pemerintah .....	13
5. Keuangan Daerah.....	13
6. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	14
7. Nilai Informasi Laporan Keuangan.....	16
8. Sistem Pengendalian Intern .....	17
9. Kualitas Sumber Daya Manusia .....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	21
C. Kerangka Konseptual.....	24
D. Hipotesis.....	26
BAB III    METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian .....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	27
C. Jenis dan Sumber Data.....	29
D. Populasi dan Sampel .....	29
E. Definisi Operasional Variabel .....	30
F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	39
	1. Sejarah Singkat Kabupaten Langkat.....	39
	2. Deskripsi Karakteristik Responden .....	41
	3. Deskripsi Variabel Penelitian .....	45
	4. Uji Kualitas Data .....	50
	5. Uji Analisis Regresi Berganda .....	56
	6. Uji Hipotesis.....	58
	B. Pembahasan.....	60
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan .....	63
	B. Saran .....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Mapping Penelitian Sebelumnya ..... 22
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian ..... 28
Tabel 3.2	Populasi dan Sampel Penelitian..... 30
Tabel 3.3	Operasionalisasi Variabel..... 31
Tabel 3.4	Skala Pengukuran ..... 33
Tabel 4.1	Luas Daerah Langkat tahun 2015 ..... 40
Tabel 4.2	Data Hasil Kuisisioner ..... 42
Tabel 4.3	Karakteristik Responden ..... 43
Tabel 4.4	Penilaian Terhadap Variabel $X_1$ ..... 45
Tabel 4.5	Penilaian Terhadap Variabel $X_2$ ..... 47
Tabel 4.6	Penilaian Terhadap Variabel Y..... 49
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitas ..... 50
Tabel 4.8	Hasil Uji Reliabilitas ..... 52
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas ..... 53
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolineritas ..... 55
Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Berganda ..... 57
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi..... 58
Tabel 4.13	Hasil Uji T ..... 59
Tabel 4.14	Hasil Uji F ..... 60

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	25
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	53
Gambar 4.2 Grafik P-Plot.....	54
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot.....	56

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumberdaya manusia dan Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di Kabupaten Langkat”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.DR. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr.Surya Nita, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan,SE.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE.M.Si. selaku dosen pembimbing I yang sudah meluangkan waktu dan penuh kasih sayang untuk mengarahkan, membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Fitri Yani Panggabean S.E., M.Si selaku dosen pembimbing II yang sudah meluangkan waktu dan penuh kasih sayang untuk mengarahkan, membantu, memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua yang tercinta dan tersayang, Ayahanda Wadly Nuriswan dan Ibunda Nurasih Butar-butar yang telah memberikan dukungan, doa, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Suami tersayang Teguh Prabowo dan Adikku Desrianti yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk para teman seangkatan di kampus Icah, Suci, Dea, Milla, dan Linda terima kasih untuk dukungannya dan perjuangan kita bersama selama masa perkuliahan kita ini.
9. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga sangat di perlukan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Namun demikian, besar harapan penulis terhadap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 24 Februari 2020

(Yuniati Salsalina)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Organisasi pemerintahan khususnya pemerintah daerah dituntut untuk adanya perubahan yang cukup pesat dan signifikan. Ekspektasi publik terkait pemerintah daerah meningkat seiring dengan euforia reformasi dan informasi sehingga begitu banyak kesempatan bagi publik untuk mengetahui, menilai dan kemudian mengkritisi program-program yang dijalankan pemerintah.

Dengan pola manajemen pemerintahan lama (Orde Baru) yang sentralistik (1968-1998) menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan prasyarat normative antara lain relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah

seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Menurut Harnoni (2016), Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan maka laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah akan lebih bernilai (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan).

Pernyataan berupa opini diberikan oleh BPK-RI setelah memeriksa laporan keuangan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah,
- 2) Kecukupan pengungkapan,
- 3) Kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan
- 4) efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, jika pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik atau wajar.

Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat secara umum masih belum menggambarkan hasil yang cukup baik. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dari Tahun 2012 sampai dengan 2018 selama 6 (enam) tahun berturut-turut adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi selama 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, dimana opini yang diperoleh adalah opini *disclaimer*.

Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 yang dikutip dari Metro24jam.com (2016) atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga mengungkapkan adanya temuan: (1) Pertanggungjawaban uang persediaan tidak sesuai peruntukkan dan tambahan uang persediaan terlambat dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.615.039.180. (2) Penyetoran dana PFK yang dipungut BUD dan Bendahara pengeluaran terlambat dan terdapat PPh dan PPN sebesar Rp64.194.108, dipergunakan untuk keperluan pribadi. (3) Kekurangan kasi di bendahara pengeluaran sebesar Rp5.671.206.019. (4) Penatausahaan persediaan tahun anggaran 2014 pada pemerintah Kabupaten Langkat belum tertib.

Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam menciptakan laporan keuangan yang bernilai, karena yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah adalah sumber daya manusia. Terdapat permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia pada Kabupaten Langkat. Dikutip dari Liputan6 tahun 2011, Syamsul selaku mantan Bupati Langkat dinyatakan bersalah karena telah memerintahkan bawahannya yaitu Kepala

Pemegang Kas pemerintah Kabupaten Langkat Buyung Ritonga, Kabag Keuangan Surya Jahisa, Kabag Keuangan Aswan Supri dan Taufik untuk mencairkan dana kas daerah untuk kepentingan pribadi. Atas perbuatannya, Syamsul telah merugikan Negara sebesar Rp 97,8 Miliar, dan menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Syamsul menikmati Rp57 Miliar lebih untuk kepentingan pribadi. Namun seperti dijelaskan majelis hakim, Syamsul sudah mengembalikan kerugian tersebut ke kas Negara sebesar Rp80,1 Miliar.

Berdasarkan permasalahan atau fenomena diatas, dapat dilihat bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat masih belum memenuhi kriteria nilai informasi laporan keuangan yang baik. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti agar dapat memperbaiki nilai informasi laporan keuangan daerah. Adapun formula judul yang peneliti tuangkan dalam tulisan ini adalah “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Seluruh Dinas di Kabupaten Langkat”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Lemahnya kualitas sumber daya manusia di pemerintah kabupaten Langkat sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-undang dan Undang-Undang Nomor 28

tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

- b. Adanya penyelewengan uang negara sebesar Rp 97,8 Miliar oleh pejabat yang bertanggungjawab di pemerintah kabupaten langkat atas perintah Syamsul selaku mantan Bupati Kabupaten Langkat.
- c. Tidak adanya peningkatan opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Langkat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 yang membuktikan laporan keuangan masih belum seluruhnya memenuhi kriteria nilai informasi laporan yang baik.

## **2. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya cakupan yang berhubungan dengan nilai informasi laporan keuangan maka penulis membatasi masalah hanya pada kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Seluruh Dinas di Pemerintah Kabupaten Langkat.

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian mengenai Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, yang disesuaikan dengan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
3. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Terhadap Pemerintah Kabupaten Langkat.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah Kualitas Sumber Daya Manusia secara parsial Berpengaruh Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- b. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- c. Untuk mengetahui apakah Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan Berpengaruh Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Terhadap Pemerintah Kabupaten Langkat.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang didapat dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi di lapangan.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama.
- c. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zuliarti (2012) yang berjudul: “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Kudus)”. Sedangkan Penelitian ini berjudul: “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pada Seluruh Dinas Pemerintah Kabupaten Langkat”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

##### 1. Variabel penelitian

penelitian terdahulu memiliki 3 variabel bebas ( $X$ ) yaitu Kapasitas SumberDaya manusia ( $X_1$ ), Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_2$ ),

Pengendalian Intern Akuntansi ( $X_3$ ) serta 1 (satu) variabel terikat (Y) yaitu Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Sedangkan penelitian ini memiliki 2 (dua) variabel bebas (X) yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( $X_2$ ) dan 1 (satu) variabel terikat (Y) yaitu Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.

2. Jumlah sampel (n)

Penelitian terdahulu meneliti sebanyak 34 SKPD di Kabupaten Pasaman Barat sedangkan penelitian ini meneliti sebanyak 19 Dinas di Kabupaten Langkat.

3. Waktu penelitian

Peneliti Sebelumnya dilakukan tahun 2012 sedangkan penelitian ini tahun 2019.

4. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian terdahulu pada SKPD di Kabupaten Kudus sedangkan Penelitian ini pada Seluruh Dinas di Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Otonomi Daerah**

Dalam sistem Pemerintahan, otonomi di Indonesia telah melalui berbagai regulasi. Pada pemerintahan Orde Baru memiliki rentang waktu paling lama implementasinya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sampai masuknya era reformasi. Namun meski dikatakan Undang-Undang mengenai pembagian kewajiban daerah maupun hak daerah, pada kenyataannya undang-undang ini hanya menunjukkan kuatnya kontrol pusat terhadap daerah (sentralisasi) dan mengakibatkan ketergantungan dan keterikatan daerah terhadap pusat yang begitu kuat.

Undang-Undang Otonomi daerah sendiri mulai terkonsep dan disahkan pada masa kepemimpinan presiden B.J Habibie dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di revisi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada masa kepemimpinan presiden Megawati karena dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tujuan dari lahirnya Undang-undang pemerintahan daerah yaitu sebagai antisipasi pembaharuan dan menyempurnakan beberapa aturan yang melandasi pelaksanaan pemerintahan daerah yang sudah tidak efektif dalam perkembangan yang pada saat itu terjadi. Pengertian otonomi daerah

menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat dua istilah yang sering di samakan dengan otonomi daerah yaitu kata sentralisasi dan desentralisasi, walaupun secara teori terpisah dan dalam praktiknya susah dibedakan. Sentralisasi berasal dari kata bahasa inggris "*center*" yang artinya pusat atau tengah. Rira nuradhawati (2019), Sentralisasi adalah memusatkan sejumlah wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi menurut nuradhawati (2019) adalah distribusi kewenangan dari pusat ke daerah, yang dapat di terjemahkan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan lainnya) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pilkada langsung dan Pemilu Presiden salah satu perubahan dalam sistem pemerintahan yang terjadi di saat sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Beberapa regulasi atau elemen utama dari desentralisasi antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian di ubah atau direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab dalam struktur terdesentralisasi.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi

desentralisasi fiskal dengan menetapkan aturan baru tentang pembagian sumber pendapatan.

- c. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan hukum dan perdagangan, telah dialihkan ke daerah otonom. Sedangkan tanggung jawab kota dan kabupaten salah satunya dalam bidang pelayanan publik seperti kesehatan, prasarana dan pendidikan dengan provinsi menjadi koordinatonya. Reformasi desentralisasi mensyaratkan adanya reformasi hubungan pusat dan daerah. Ketika masyarakat lokal dan pemerintah bersatu, keduanya secara bersama-sama dapat memberdayakan sumber daya lokal dengan tujuan mencapai taraf pembangunan ekonomi yang tinggi di daerah masing-masing.

## **2. Bentuk Umum Pemerintah dan Pemisahan Kekuasaan**

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila, kekuasaan ada ditangan rakyat sesuai dengan sia keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan diantara penyelenggara negara.

Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPR/DPRD.

### **3. Entitas Pelaporan**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Daerah.
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat.
- d. Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

#### **4. Pelaporan Keuangan Pemerintah**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melakukan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap undang-undang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan harus memberikan pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dalam rangka memperkuat akuntabilitas, harus secara jelas menyatakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem pengendalian internal dan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Laporan keuangan yang telah dibuat harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai lembaga pemeriksaan ekstern yang kuat dan mandiri, sebelum disampaikan pada badan legislatif (DPR/Dewan Perwakilan Rakyat). Pemeriksaan oleh BPK bermaksud untuk pemberian pendapat (opini).

#### **5. Keuangan Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah penjelasan Pasal 156 Ayat 1 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah tersebut meliputi : Hak menarik pajak daerah, Hak untuk menarik retribusi daerah, Hak mengadakan pinjaman, dan Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pasar. Sedangkan kewajiban daerah meliputi : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha keuangan dan tata usaha umum yang sekarang dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

## **6. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut : “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah. Kepala daerah menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengemukakan bahwa : “Asas-asas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat”.

Ekonomis yang dimaksud diatas adalah perolehan masukkan dengan kuantitas dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukkan tertentu atau penggunaan masukkan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan pelaksanaan anggaran daerah.

## **7. Nilai Informasi Laporan Keuangan**

Harifan (2009) menyatakan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim dan berlaku. Informasi akan berguna apabila informasi tersebut memiliki nilai yaitu diantaranya adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan.

Keterandalan merupakan kemampuan informasi dalam laporan keuangan untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pemakai informasi tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Jadi, informasi yang diperoleh dari data yang digunakan bisa teruji keandalannya untuk meraih tujuan yang diinginkan baik personal maupun organisasi.

Penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu merupakan hal yang paling penting dalam pemerintahan. Apabila informasi tersedia dalam waktu yang lama, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai lagi dikarenakan ketepatanwaktuan informasi itu tersedia tidak tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang diambil. Informasi akuntansi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memiliki karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, keempat

karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, terdiri atas Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

## **8. Sistem Pengendalian Intern**

Perkembangan pengendalian intern di Indonesia mulai ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inti dari PP Nomor 60 tahun 2008 adalah menciptakan suatu Sistem Pengendalian Intern yang dapat mewujudkan praktik *good governance* dalam pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern memiliki unsur-unsur di dalamnya yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Unsur-unsur tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

### **a. Lingkungan Pengendalian**

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif.
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

### **b. Penilaian Resiko**

Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, yang terdiri atas:

- 1) Identifikasi risiko

sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

2) analisis resiko

Dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, yang terdiri atas:

- 1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Pembinaan sumber daya manusia.
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- 4) Pengendalian fisik atas aset.
- 5) Pemisahan fungsi.
- 6) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, dilakukan dengan cara menetapkan ukuran dan indikator kinerja serta mereviu secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.
- 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dalam kejadian
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- 11) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 : “Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.”

e. Pemantauan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 : “Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan melalui:

- 1) Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern.
- 2) Evaluasi terpisah, dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak ekstern pemerintah.
- 3) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Ramandei (2009) menyatakan dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif diperlukan adanya fungsi internal audit yang berperan sebagai mata dan telinga dari pimpinan tertinggi organisasi. Oleh karena itu diharapkan dengan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

## **9. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dibedakan antara pengertiannya secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun memperoleh pekerjaan. SDM secara makro berarti juga penduduk yang berada dalam usia produktif, meskipun karena berbagai sebab dan/atau masalah masih terdapat yang belum produktif karena belum memasuki lapangan kerja yang terdapat di masyarakatnya. Sumber daya manusia dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang

yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.

Pembahasan sumber daya manusia (SDM) merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dan buruknya kehidupan manusia itu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, oleh sebab itu pembinaan sumber daya manusia menjadi masalah yang utama bagi kelangsungan dan perkembangan bagi suatu organisasi, karena dengan sumber daya itulah semua organisasi dapat dikembangkan seoptimal mungkin bagi peningkatan kualitas kehidupan di masa ini dan masa mendatang. Pembinaan SDM bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, professional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien.

Tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri:

- a. Pendidikan Dasar. Pendidikan ini berupa pendidikan sekolah ataupun pendidikan luar sekolah yang merupakan pendidikan biasa ataupun pendidikan luar biasa. Tingkat pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar.
- b. Pendidikan Menengah. Pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Tingkat pendidikan menengah adalah SMP, SMA dan SMK.
- c. Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang menciptakan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat professional atau akademik sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan,

teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

Galuh (2012) menjelaskan sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian tentang kapasitas sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Zuliarti (2012). Temuannya menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi dan belum jelasnya *job description*. Walaupun sistem akuntansi yang dibangun sudah baik namun kualitas sumber daya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya maka akan menimbulkan hambatan dan akhirnya menghasilkan informasi akuntansi yang kurang atau tidak memiliki nilai salah satunya keterandalan .

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dibuat untuk membandingkan hasil penelitian yang dilakukannya sebelumnya sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang salah satu variabelnya sama dengan variabel penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan dari peneliti ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel		Hasil Penelitian
1	Fadila Ariesta (2013)	Pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan pengendalian Intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat)	$X_1 =$ Kualitas SDM $X_2 =$ Pemanfaatan TI $X_3 =$ Pengendalian Intern Akuntansi $Y =$ Nilai informasi pelaporan keuangan		Kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan.
2	Zuliarti (2012)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah Kabupaten Kudus)	$X_1 =$ Kapasitas SDM $X_2 =$ Pemanfaatan TI $X_3 =$ Pengendalian Intern Akuntansi $Y =$ Nilai informasi pelaporan keuangan		Sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, SPIP (sistem pengendalian Intern pemerintah) dan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
3	Faristina (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan Badan	$X_1 =$ Kualitas SDM $X_2 =$ Pemanfaatan TI		kualitas sumber daya manusia tidak terhadap keandalan pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan

		Layanan Umum (Studi pada BLU di kota Semarang)	$X_3 =$ Pengendalian Intern Akuntansi  $X_4 =$ Komitmen Organisasi  $Y =$ Keandalan Pelaporan Keuangan		keuangan, sistem pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan sedangkan Komitmen organisasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.
4	Ferawati fajrin (2014)	Pengaruh sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (studi empiris pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman)	$X_1 =$ Sistem Pengendalian Intern  $X_2 =$ Pengawasan Keuangan Daerah  $Y =$ Nilai informasi pelaporan keuangan		Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.
5	Gerry Armando (2013)	Pengaruh sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (studi empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi)	$X_1 =$ Sistem Pengendalian Intern  $X_2 =$ Pengawasan Keuangan Daerah  $Y =$ Nilai informasi pelaporan keuangan		Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.

Sumber : Penulis, 2019

### **C. Kerangka Konseptual**

Sujarweni (2014), Kerangka konseptual diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan yang diteliti sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang terbentuk konsep, yang kemudian kalau dirumuskan kedalam hipotesis yang dapat diuji.

Pada uraian atau teori-teori dari latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan**

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, OPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman dibidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Selain itu, dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

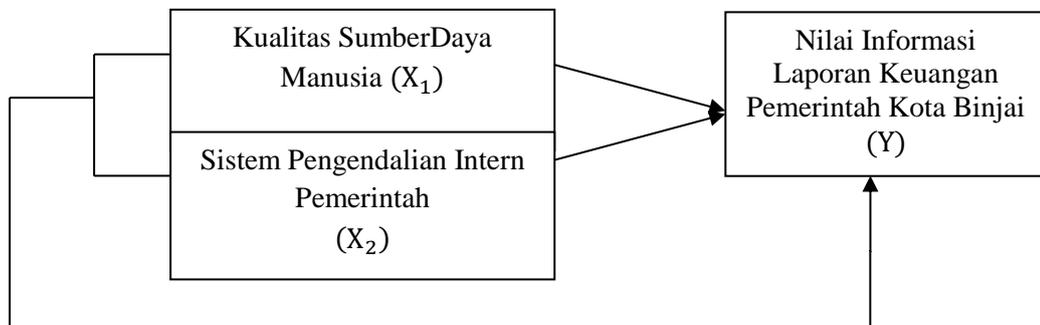
#### **2. Hubungan Sistem pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan

yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai.

Apabila SPI dapat diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang baik, dan begitu pula sebaliknya, apabila penerapan SPI tidak berjalan dengan baik, maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik pula.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

#### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2010) Penelitian asosiatif adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis.

Proses penelitian ini bersifat normalitas seperti pada penggunaan metode kuantitatif pada umumnya, hipotesis dapat dirumuskan dengan menggunakan konsep atau teori untuk menjawab rumusan masalah. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan instrument penelitian. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dan kemudian dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Seluruh Dinas di Kabupaten Langkat.



### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui pemberian kuisioner kepada Kasubag Keuangan dan Bendahara pada tiap dinas di Kabupaten Langkat. Pengumpulan data akan diperoleh dari angket atau kuisioner kepada karyawan dan melalui sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **D. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2017), Populasi adalah wilayah generalisasi berisi baik subjek maupun objek yang mempunyai karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah Seluruh Dinas di Kabupaten Langkat yang berjumlah 19 Dinas.

#### **2. Sampel**

Adapun pengertian sampel menurut Sugiyono (2017) adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini sebanyak 57 orang pegawai dengan masing-masing tiap Dinas terdapat 3 orang pegawai yang akan dijadikan sampel atau responden yaitu Kepala bagian keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. Tabel populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2.  
Populasi dan Sampel Penelitian Seluruh Dinas Pemerintah Kabupaten Langkat

No	Nama Dinas	No	Nama Dinas
1	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
2	Dinas Pendidikan	12	Dinas Perhubungan
3	Dinas Kesehatan	13	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
4	Dinas Koperasi	14	Dinas Perdagangan & Perindustrian
5	Dinas Ketenagakerjaan	15	Dinas Kelautan & Perikanan
6	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	16	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman
7	Dinas Komunikasi & Informatika	17	Dinas Sosial
8	Dinas Pemuda & Olahraga	18	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
9	Dinas Lingkungan Hidup	19	Dinas Parawisata & Kebudayaan
10	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		

Sumber: <https://www.langkatkab.go.id>

## E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

### 1. Variabel Terikat

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel *independent* yaitu: variabel Kualitas Sumberdaya Manusia ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian Intern ( $X_2$ ) dan 1 (satu) variabel *dependent* yaitu Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y).

### 2. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan definisi kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Tabel 3.3. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
----	----------	-----------	-----------	-------

1	Kualitas SumberDaya manusia (X1)	<p>a. Tanggung Jawab (<i>Level of responsibility</i>)</p> <p>b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (Fadila Ariesta, 2013)</p>	<p>Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. (Arfianti, 2011)</p>	Likert
2	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ( X2)	<p>Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern :</p> <p>a. Lingkungan Pengendalian</p> <p>b. Penilaian Resiko</p> <p>c. Kegiatan Pengendalian</p> <p>d. Informasi dan Komunikasi</p> <p>e. Pemantauan Pengendalian Intern</p> <p>( PP Nomor 60 Tahun 2008 )</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. ( PP Nomor 60 Tahun 2008 )</p>	Likert

3	Nilai Informasi Laporan Keuangan ( Y )	a. Relevan b. Andal c. Dapat dibandingkan d. Dapat dipahami (PP Nomor 71 Tahun 2010)	nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyampaian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. (Suwardjono dalam Iga amalia, 2013)	Likert
---	--	--	--	--------

Sumber : Penulis, 2019

#### F. Teknik Pengumpulan data

Indriantoro (2011), Pengumpulan data adalah proses untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan dalam penggunaan teknik ini akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang dimana data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli berupa kuisisioner.

Sujarweni (2014), Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner termasuk teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti terlebih dahulu mengetahui pasti variabel yang diukur dan mengetahui harapan dari responden. Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari kuisisioner-kuisisioner tersebut yang diajukan kepada responden, pada penelitian ini digunakan skala pengukuran *Likert*. Menurut Sugiyono (2017:93): “Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Adapun skala pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Skala Pengukuran

Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu/Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2017:93)

Penyebaran kuisisioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi langsung kuisisioner kepada para responden. Setiap paket kuisisioner berisi pertanyaan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.

### G. Teknik Analisis Data

Untuk mendeskripsikan hasil dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan dalam mengelolah data penelitian dilakukan beberapa

pengujian seperti uji kualitas data dan uji asumsi klasik serta menggunakan program pengolahan data statistik yaitu program SPSS Versi 18.

## 1. Pengujian Kualitas Data

### a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013) “uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dan suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut”. Untuk itu dapat dikemukakan bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur maupun mengukur apa yang diukur.

Menurut Ghozali (2013) “Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ , dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dari hasil output (*Corrected Item Total Correlation*) dengan  $r_{tabel}$ . Total correlation dengan kriteria sebagai berikut: jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan nilainya positif, maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

$$r_{xy} = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x^2)(\Sigma y^2)}{\sqrt{\{\Sigma x^2 - (\Sigma x)(\Sigma y) - (\Sigma y)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$  = Koefisien Korelasi

$\Sigma x$  = Skor Variabel Independen

$\Sigma y$  = Skor Variabel Dependen

- $\Sigma x^2$  = Kuadrat dari Skor Variabel Independen  
 $\Sigma y^2$  = Kuadrat dari Skor Variabel Dependen  
 $\Sigma xy$  = Hasil Perkalian dari Skor Jumlah Variabel X dan Variabel Y  
 $n$  = Jumlah Responden

### **b. Uji Reliabilitas**

Menurut Ghazali (2013) “Reliabilitas sebenarnya adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika  $\alpha > 0,60$  dan dikatakan tidak reliabel jika  $\alpha < 0,60$ .

## **2. Uji Asumsi Data/Asumsi Klasik**

Untuk mengetahui kelayakan model regresi berganda, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu :

### **a. Uji Normalitas**

Menurut Ghazali (2013), “Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model ini regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka data

berdistribusi normal dan jika nilai signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Menurut Ghazali (2013), “Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas menyatakan hubungan antara sesama variabel independen. Asumsi multikolinieritas menyatakan hubungan antara sesama variabel independen. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari model regresi. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Ghazali (2013), “Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu (1) nilai Tolerance dan (2) VIF (Variance Inflation Factors). Jika, nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$  maka terjadi gejala multikolinieritas dan jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$  maka tidak terjadi gejala multikolinieritas”.

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghazali (2013), “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam uji ini, apabila hasilnya  $\text{sig} > 0,05$  maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, maka model yang baik ialah tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **3. Analisis Regresi Linear Berganda**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda (Multiple Linear Regression). Untuk membuktikan hipotesis digunakan alat uji statistik regresi linier berganda, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan
a	: Konstanta
b <sub>1</sub>	: Kualitas SumberDaya Manusia
X <sub>1</sub>	: Sistem Pengendalian Intern
b <sub>2</sub>	: Koefisien Regresi
e	: Error

#### 4. Pengujian Hipotesis

##### a. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Ghozali (2013) menyatakan Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui *adjusted* (R<sup>2</sup>). Jika hasil yang diperoleh > 0,5, maka model yang digunakan dianggap cukup handal dalam membuat estimasi. Semakin besar angka *Adjusted* R<sup>2</sup> maka semakin baik model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika *Adjusted* R<sup>2</sup> semakin kecil berarti semakin lemah model tersebut untuk menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen (Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem

Pengendalian Intern) terhadap variabel dependen (Nilai Informasi Pelaporan Keuangan) yaitu dengan mengkuadratkan koefisien korelasi.

**b. Uji Signifikan Parsial ( Uji t )**

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Ghozali (2013) “Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen”. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi  $t_{hitung}$  dengan ketentuan:

- 1) Jika,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\sigma$  0.05, maka  $H_0$  ditolak, dan
- 2) Jika,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\sigma$  0.05, maka  $H_0$  diterima.

**c. Uji Signifikan Simultan ( Uji F )**

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan F-test. Menurut Ghozali (2013) “Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat”. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi  $F_{hitung}$  dengan ketentuan:

- 1) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\sigma$  0.05, maka  $H_1$  ditolak, dan
- 2) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\sigma$  0.05, maka  $H_1$  diterima

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Langkat**

Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Ibu Kota Kabupaten Langkat sekarang adalah Stabat. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residen atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah. Pada tahun 1963, wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administratif pemerintah langsung dibawah Bupati serta Asisten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir. Kabupaten Langkat dalam melaksanakan pembangunan dibagi atas 3 wilayah pembangunan antara lain:

- a. Wilayah Pembangunan I (Luhak Langkat Hulu) terdiri dari Kejuruan selesai, Kejuruan Bahorok, Kejuruan Sei Bingai, Distrik Kwala, dan Distrik Salapian.
- b. Wilayah Pembangunan II (Luhak Langkat Hilir) terdiri dari Kejuruan Stabat, Kejuruan Bingei, Distrik Secanggang, Distrik Padang Tualang, Distrik Cempa dan Distrik Pantai Cermin.
- c. dan Wilayah Pembangunan III (Teluk Haru) terdiri dari Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji, Distrik Pulau Kampai dan Distrik Sei Lapan.

Kabupaten Langkat terletak pada 3°14'00" – 4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98°45'00" Bujur Timur dan 4-105 m dari permukaan laut secara geografis. Area Kabupaten Langkat seluas ± 6.263,29 Km<sup>2</sup> (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Aceh, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Pangkalan Susu.

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan 2015

No	Kecamatan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Ratio Terhadap Total (%)
1	Secanggang	1.101,83	17,59
2	Serapit	98,50	1,57
3	Gebang	221,73	3,54
4	Babalan	236,84	3,78
5	Sei. Bingei	333,17	5,32
6	Brandan Barat	206,23	3,29
7	Selesai	167,73	2,68
8	Pangkalan Susu	42,05	0,67
9	Pematang Jaya	108,85	1,74
10	Wampu	194,21	3,10
11	Batang Serangan	899,38	14,36
12	Sawit Seberang	209,10	3,34
13	Padang Tualang	221,14	3,53
14	Hinai	105,26	1,68
15	Secanggang	231,19	3,69
16	Tanjung Pura	179,61	2,87
17	Gebang	178,49	2,85
18	Babalan	76,41	2,85
19	Sei. Lapan	280,68	4,48
20	Brandan Barat	89,80	1,43
21	Besitang	720,74	11,51
22	Pangkalan Susu	151,35	2,42
23	Pematang Jaya	209,00	3,34
Jumlah	6.263,29	100,00	

Sumber : BPS Langkat, 2016

Administrasi pemerintahan Kabupaten Langkat pada tahun 2015 terdiri dari 23 Kecamatan, 37 Kelurahan dan 240 Desa. Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang Bupati. Kekuatan Sosial Politik Hasil Pemilu 2014, Pada April 2014 diadakan kembali Pemilu untuk memilih wakil rakyat di DPR Pusat, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota. Sebanyak 12 partai yang ada pada Pemilu tahun 2014, yang terdiri 1 partai lokal dan 11 partai nasional. Pemilu 2014 menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Demokrat yang mendominasi hasil Pemilu tahun 2009 tergeser oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Partai Golkar, Demokrat, PDIP dan Partai Gerindra adalah 4 partai yang paling menonjol dari jumlah 12 partai peserta Pemilu 2014. Sebanyak 498.361 jumlah suara sah yang diperoleh untuk organisasipeserta pemilu Kabupaten Langkat. Untuk 4 partai terbesar sebanyak 285.195 suara dengan rincian 101.936 suara untuk Partai Golkar atau 20,45 persen; 76.037 suara untuk Partai Demokrat atau 15,26 persen, 54.290 suara untuk Partai PDIP atau 10,89 persen; 52.932 suara untuk Gerindra atau 10,62 persen dari perolehan suara dari hasil Pemilu 2014 ada 50 orang wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dengan rincian 11 orang dari Partai Golkar, 8 orang dari Partai Demokrat, 6 orang dari PDI-P, 5 orang dari Gerindra, 4 orang dari Nasdem, 3 orang dari Hanura, 3 orang dari PBB, 3 orang Partai PKS, 3 orang dari PPP, 2 orang dari PAN dan 2 orang dari PKB.

## **2. Deskripsi Karakteristik Responden**

### **a. Tingkat Pengembalian Kuisisioner**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner yang di sampaikan langsung kepada para responden. Kuisisioner yang telah di isi oleh

responden dikumpulkan kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dalam *Microsoft Office Excel 2007* dan diolah dengan *SPSS for Windows*. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam menyalurkan dan mengumpulkan kuisioner tersebut berkisar 4 minggu atau 1 bulan. Dari 57 kuisioner yang dibagikan sebanyak 42 kuisioner yang kembali. Tabel data kuisioner dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2. Data Hasil Kuisioner

Keterangan	Jumlah
Kuisioner yang dikirim	57
Kuisioner yang kembali	42
Kuisioner yang tidak kembali	15
Kuisioner yang di tolak	-
Kuisioner yang digunakan dalam penelitian	42
Persentase Pengembalian Kuisioner	74%

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2019

#### b. Karakteristik Responden

Data karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari segi jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan lama bekerja, jabatan dan golongan di Dinas Kabupaten Langkat. Tabel data karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Karakteristik Responden

No	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	1. Pria	23	54.8%
	2. Perempuan	19	45.2%
	Total	42	100%
2	Umur		
	1. 30-39	18	42.9%
	2. 40-49	20	47.6%
	3. 50-59	4	9.5%
	Total	42	100%
3	Pendidikan Terakhir		
	1. SLTA/SMA	1	2.4%
	2. S1	38	90.5%
	3. S2	3	7.1%
	Total	42	100%
4	Masa Kerja		
	1. < 5 Tahun	1	2.4%
	2. 5-10 Tahun	7	16.7%
	3. > 10 Tahun	34	81.0%
	Total	42	100%
5	Jabatan		
	1. Kasubag Umum	10	23.8%
	2. Kasubag Keuangan	11	26.2%
	3. Bendahara	7	16.7%
	4. Lainnya	14	33.3%
	Total	42	100%
6	Golongan		
	1. Gol.IV	3	7.1%
	2. Gol.III	26	61.9%
	3. Gol.II	12	28.6%
	4. lainnya	1	2.4%
	Total	42	100%

Sumber : Data yang diolah SPSS, 18

- 1) Menunjukkan bahwa sekitar 23 orang atau 54.8% responden berjenis kelamin pria dan sisanya sebanyak 19 orang atau 45.2% responden berjenis kelamin perempuan.

- 2) Menunjukkan bahwa sekitar 20 orang atau 47.6% responden berusia 40-49 tahun, 18 orang atau 42.9% responden berusia 30-39 tahun, dan sisanya sebanyak 4 orang atau 9.5% responden berusia 40-59 tahun.
- 3) Menunjukkan bahwa sebanyak 38 orang atau 90.5% responden didominasi oleh lulusan Sarjana (S1), 3 orang atau 7.1% responden dengan lulusan Pasca Sarjana (S2), dan sisanya sebanyak 1 orang atau 2.4% responden dengan lulusan SLTA/SMA.
- 4) Menunjukkan bahwa sekitar 34 orang atau 81.0% responden bekerja selama >10 tahun, 7 orang atau 16.7% responden bekerja selama 5-10 tahun, dan sisanya sebanyak 1 orang atau 2.4% responden telah bekerja selama < 5 tahun.
- 5) Menunjukkan bahwa 11 orang atau 26.2% responden memiliki jabatan sebagai Kasubag Keuangan, 10 orang atau 23.8% responden memiliki jabatan Kasubag Umum, 7 orang responden atau 16.7% responden memiliki jabatan sebagai Bendahara, dan sisanya sebanyak 14 orang atau 33.3% responden berada pada jabatan lainnya.
- 6) Menunjukkan bahwa sekitar 26 orang atau 61.9% responden memiliki Golongan Tingkat III, 3 orang atau 7.1% responden memilongi Golongan Tingkat IV, dan sisanya sebanyak 1 orang atau 2.4% responden berada pada golongan lainnya.

### 3. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki 3 buah variabel penelitian yaitu Nilai informasi pelaporan keuangan sebagai variabel bebas dan Kualitas sumber daya manusia serta Sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel terikat. Dalam penyebaran kuisisioner tiap variabel memiliki 7 butir pertanyaan yang akan di isi oleh 42 responden. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Berikut tabel frekuensi hasil pengambilan data dari tiap pertanyaan yang ada pada tiap variabel.

#### a. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ )

Tabel 4.4 Penilaian Responden Terhadap Variabel  $X_1$

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	7	16,7	34	81,0	1	2,4	0	0	0	0	42	100
P2	4	9,5	33	78,6	5	11,9	0	0	0	0	42	100
P3	3	7,1	39	92,9	0	0	0	0	0	0	42	100
P4	6	14,3	33	78,6	2	4,8	1	2,4	0	0	42	100
P5	6	14,3	26	61,9	9	21,4	1	2,4	0	0	42	100
P6	5	11,9	29	69,0	5	11,9	3	7,1	0	0	42	100
P7	7	16,7	31	73,8	2	4,8	2	4,8	0	0	42	100

Sumber : Diolah di SPSS versi 18

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dari 42 responden sebanyak 7 responden (16,7%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 1, sebanyak 34 responden (81,0%) menyatakan setuju pada pernyataan 1, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menyatakan netral pada pernyataan 1.
- 2) Dari 42 responden sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 2, sebanyak 33 responden (78,6%) menyatakan setuju pada pernyataan 2, sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan netral pada pernyataan 2, dan sebanyak 0 responden (0%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 2.

pernyataan 2, sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan netral pada pernyataan 2.

- 3) Dari 42 responden sebanyak 3 responden (7,1%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 3, sebanyak 39 responden (92,9%) menyatakan setuju pada pernyataan 3.
- 4) Dari 42 responden sebanyak 6 responden (14,3%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 4, sebanyak 33 responden (78,6%) menyatakan setuju pada pernyataan 4, sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan netral pada pernyataan 4, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 4.
- 5) Dari 42 responden sebanyak 6 responden (14,3%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 5, sebanyak 26 responden (61,9%) menyatakan setuju pada pernyataan 5, sebanyak 9 responden (21,4%) menyatakan netral pada pernyataan 5, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 5.
- 6) Dari 42 responden sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 6, sebanyak 29 responden (69,0%) menyatakan setuju pada pernyataan 6, dan sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan netral pada pernyataan 6 dan sebanyak 3 responden (7,1%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 6.
- 7) Dari 42 responden sebanyak 7 responden (16,7%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 7, sebanyak 31 responden (73,8%) menyatakan setuju pada pernyataan 7, sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan netral pada

pernyataan 7 dan sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 7.

b. Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ )

Tabel 4.5 Penilaian Responden Terhadap Variabel  $X_2$

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	5	1,9	29	69,0	4	9,5	4	9,5	0	0	42	100
P2	11	26,2	28	66,7	2	4,8	1	2,4	0	0	42	100
P3	4	9,5	36	85,7	1	2,4	1	2,4	0	0	42	100
P4	5	11,9	32	76,2	5	11,9	0	0	0	0	42	100
P5	5	11,9	36	85,7	1	2,4	0	0	0	0	42	100
P6	5	11,9	29	69,0	8	19,0	0	0	0	0	42	100
P7	8	19,0	21	50,0	13	31,0	0	0	0	0	42	100

Sumber : Diolah di SPSS versi 18

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dari 42 responden sebanyak 5 responden (1,9%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 1, sebanyak 29 responden (69,0%) menyatakan setuju pada pernyataan 1, sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan netral pada pernyataan 1, dan sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 1.
- 2) Dari 42 responden sebanyak 11 responden (26,2%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 2, sebanyak 28 responden (66,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 2, sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan netral pada pernyataan 2, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 2.
- 3) Dari 42 responden sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 3, sebanyak 36 responden (85,7%) menyatakan setuju pada

pernyataan 3, sebanyak 1 responden (2,4%) menyatakan netral pada pernyataan 3, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 3.

- 4) Dari 42 responden sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 4, sebanyak 32 responden (76,2%) menyatakan setuju pada pernyataan 4, dan sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan netral pada pernyataan 4.
- 5) Dari 42 responden sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 5, sebanyak 36 responden (85,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 5, dan sebanyak 1 responden (2,4%) menyatakan netral pada pernyataan 5.
- 6) Dari 42 responden sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 6, sebanyak 29 responden (69,0%) menyatakan setuju pada pernyataan 6, dan sebanyak 8 responden (19,0%) menyatakan netral pada pernyataan 6 .
- 7) Dari 42 responden sebanyak 8 responden (19,0%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 7, sebanyak 21 responden (50,0%) menyatakan setuju pada pernyataan 7, dan sebanyak 13 responden (31,0%) menyatakan netral pada pernyataan 7.

## c. Variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)

Tabel 4.6 Penilaian Responden Terhadap Variabel Y

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
P1	11	26.2	30	71.4	1	2.4	0	0	0	0	42	100
P2	6	14.3	36	85.7	0	0	0	0	0	0	42	100
P3	4	9.5	36	85.7	2	4.8	0	0	0	0	42	100
P4	8	19.0	32	76.2	2	4.8	0	0	0	0	42	100
P5	2	4.8	25	59.5	9	21.4	6	14.3	0	0	42	100
P6	5	11.9	32	76.2	5	11.9	0	0	0	0	42	100
P7	17	40.5	23	54.8	2	4.8	0	0	0	0	42	100

Sumber : Diolah di SPSS versi 18

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dari 42 responden sebanyak 11 responden (26,2%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 1, sebanyak 30 responden (71,4%) menyatakan setuju pada pernyataan 1, dan sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan netral pada pernyataan 1.
- 2) Dari 42 responden sebanyak 6 responden (14,3%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 2, dan sebanyak 36 responden (85,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 2.
- 3) Dari 42 responden sebanyak 4 responden (9,5%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 3, sebanyak 36 responden (85,7%) menyatakan setuju pada pernyataan 3, dan sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan netral pada pernyataan 3.
- 4) Dari 42 responden sebanyak 8 responden (19,0%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 4, sebanyak 32 responden (76,2%) menyatakan setuju pada

pernyataan 4, dan sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan netral pada pernyataan 4.

- 5) Dari 42 responden sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 5, sebanyak 25 responden (59,5%) menyatakan setuju pada pernyataan 5, sebanyak 9 responden (21,4%) menyatakan netral pada pernyataan 5, dan sebanyak 6 responden (14,3%) menyatakan tidak setuju pada pernyataan 5.
- 6) Dari 42 responden sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 6, sebanyak 32 responden (76,2%) menyatakan setuju pada pernyataan 6, dan sebanyak 5 responden (11,9%) menyatakan netral pada pernyataan 6 .
- 7) Dari 42 responden sebanyak 17 responden (40,5%) menyatakan sangat setuju pada pernyataan 7, sebanyak 23 responden (54,8%) menyatakan setuju pada pernyataan 7, dan sebanyak 2 responden (4,8%) menyatakan netral pada pernyataan 7.

#### **4. Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji Validitas**

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Corelation* melalui program *SPSS for Windows*. Hal pertama yang dilakukan dalam pengujian validitas adalah mentabulasikan data. Kemudian berdasarkan hasil analisis dapat dilihat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai  $r_{tabel}$ ,  $r_{tabel}$  dicari

pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (N=42), maka didapat  $r_{tabel}$  sebesar 0,304.

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji validitas data bahwa seluruh item pertanyaan memenuhi syarat nilai  $r_{tabel} > 0,304$  dan dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan tersebut valid serta dapat digunakan dalam pengujian reliabilitas dan analisis selanjutnya.

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Validitas	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r Tabel (N=42)	Keterangan
Kualitas SDM	P1	0.713	0.304	Valid
	P2	0.750	0.304	Valid
	P3	0.777	0.304	Valid
	P4	0.709	0.304	Valid
	P5	0.683	0.304	Valid
	P6	0.734	0.304	Valid
	P7	0.703	0.304	Valid
SPIP	P1	0.694	0.304	Valid
	P2	0.613	0.304	Valid
	P3	0.748	0.304	Valid
	P4	0.694	0.304	Valid
	P5	0.679	0.304	Valid
	P6	0.582	0.304	Valid
	P7	0.611	0.304	Valid
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	P1	0.739	0.304	Valid
	P2	0.678	0.304	Valid
	P3	0.609	0.304	Valid
	P4	0.646	0.304	Valid
	P5	0.631	0.304	Valid
	P6	0.677	0.304	Valid
	P7	0.581	0.304	Valid

Sumber : Data diolah pada SPSS 18

## b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang mempunyai validitas. Instrument dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ )

dengan bantuan SPSS. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variable yang ada. Jika nilai koefisien  $\alpha > 0,60$  maka disimpulkan bahwa instrument penelitian tersebut handal dan reliable. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.8 yang menunjukkan ketiga variabel diatas 0,60 yang berarti reliable.

Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Pertanyaan	Keterangan
Kualitas SDM	0.836	7	Reliable
SPIP	0.769	7	Reliable
Nilai informasi pelaporan keuangan	0.773	7	Reliable

Sumber : Data diolah pada SPSS 18

Sebelum melakukan analisis regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar dapat diperkirakan yang tidak bias dan efisien. Hasil uji asumsi klasik tercantum pada 4.9, tabel 4.10, dan tabel 4.11.

#### a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan uji statistic non-parametik *Kolmogrov smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan untuk *Kolmogrov smirnov* yaitu value pada kolom Asimp. Sig (2-tailed)  $>$  level of significant  $\alpha = 5\%$ .

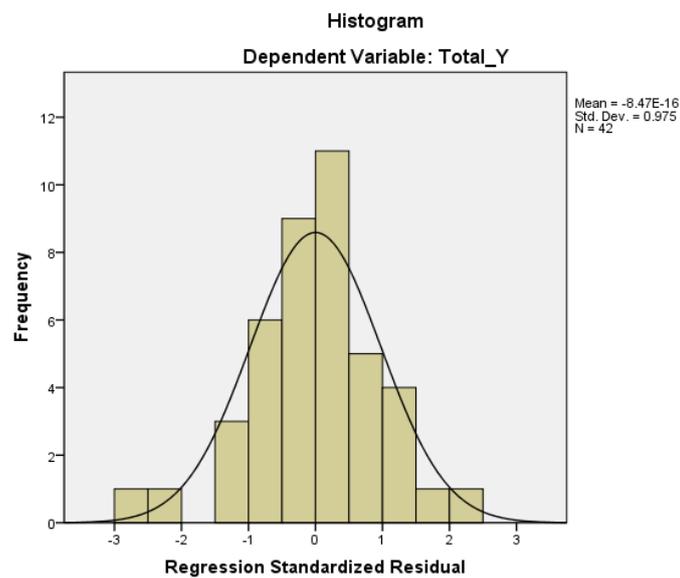
Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.62562188
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		.654
Asymp. Sig. (2-tailed)		.785

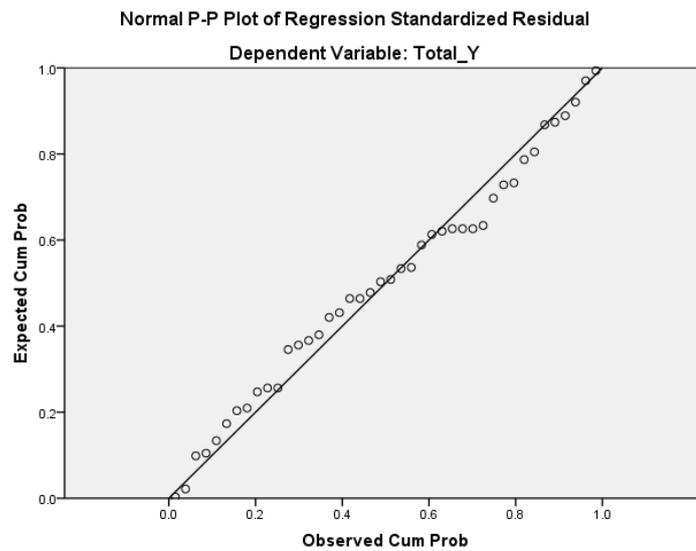
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah pada SPSS 18



Gambar 4.1 Grafik Histogram



Gambar 4.2 Grafik P-Plot

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov smirnov didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,785 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factors*). Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka bebas atau tidak terjadi gejala multikolinieritas. Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.606	3.206		2.373	.023		
	Total_X1	.291	.161	.280	1.807	.079	.449	2.226
	Total_X2	.477	.139	.531	3.429	.001	.449	2.226

a. Dependent Variable: Total\_Y

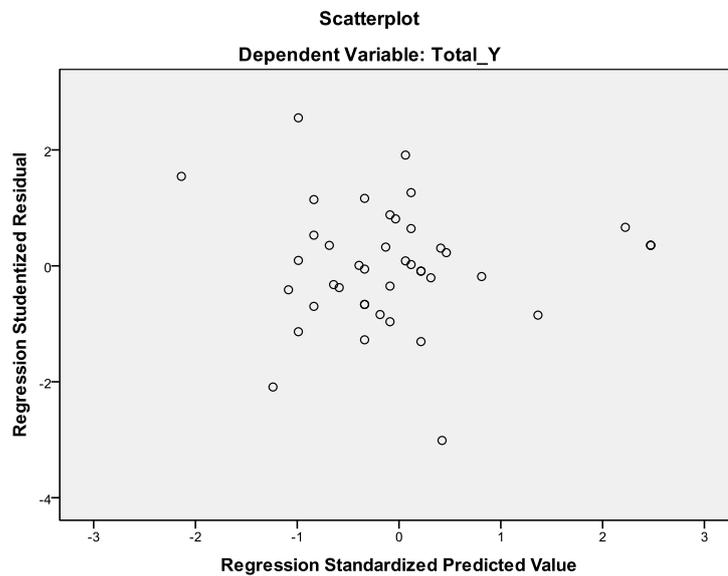
Sumber : Data diolah pada SPSS 18

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya gejala multikolinieritas. Masing-masing variable independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1. Untuk kualitas sumberdaya manusia (SDM) memiliki nilai tolerance 0,449; dan Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memiliki nilai tolerance 0,449. Jika dilihat dari VIF, masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10 yaitu Kualitas SDM memiliki VIF 2,226 dan SPIP memiliki VIF 2.226. Maka kesimpulan yang diperoleh adalah tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel independennya.

### c. Uji Heterokedasitas

Pengujian heterokedasitas dalam penelitian ini melalui analisis grafik dengan cara membaca grafik *Scatterplot*, dimana tidak terjadi heterokedasitas apabila titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang

jelas, dan tersebar baik diatas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Grafik Scatterplot uji heterokedasitas dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3. Grafik Scatterplot

Gambar Scatterplot menunjukkan bahwa titi-titik yang ada menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, model regresi dikatakan tidak mengalami heterokedasitas.

## 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk melihat pengaruh kualitas SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten Langkat dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS diperoleh hasil uji pada tabel 4.11.

Tabel 4.11. Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.606	3.206		2.373	.023
	Total_X1	.291	.161	.280	1.807	.079
	Total_X2	.477	.139	.531	3.429	.001

a. Dependent Variable: Total\_Y

Model Regresi yang terbentuk berdasarkan tabel 4.11 adalah sebagai berikut:

$$Y = 7.606 + 0.291X_1 + 0.477X_2$$

Keterangan:

Y : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

X<sub>1</sub> : Kualitas SDM

X<sub>2</sub> : SPIP

Berdasarkan hasil persamaan regresi berganda, masing-masing variable menjelaskan bahwa:

- Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 7.606, artinya kualitas SDM (X<sub>1</sub>) dan SPIP (X<sub>2</sub>) dianggap konstan maka nilai informasi pelaporan keuangan konstan sebesar 7.606.
- Koefisien regresi variabel kualitas SDM (X<sub>1</sub>) sebesar 0.291 artinya kualitas SDM mengalami kenaikan sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan sebesar 0.291 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- Koefisien regresi variabel SPIP sebesar 0.477 artinya partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sebesar 1% maka peningkatan terhadap nilai informasi

pelaporan keuangan sebesar 0.477 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

## 6. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda juga dapat diketahui nilai korelasi dan koefisien determinasinya, dimana nilai korelasi mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel independen/bebas (Kualitas SDM dan SPIP) terhadap variabel dependen/terikat (Nilai informasi pelaporan keuangan).

Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762 <sup>a</sup>	.580	.559	1.667

a. Predictors: (Constant), Total\_X2, Total\_X1

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12 yang menunjukkan besarnya  $R^2$  adalah 0.580, dengan demikian besarnya pengaruh kualitas SDM dan SPIP terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan adalah sebesar 58.0%. Sedangkan sisanya 48% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

### b. Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil statistik parsial (uji t) disajikan pada tabel 4.13.

Tabel 4.13. Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.606	3.206		2.373	.023
	Total_X1	.291	.161	.280	1.807	.079
	Total_X2	.477	.139	.531	3.429	.001

a. Dependent Variable: Total\_Y

Berdasarkan hasil tabel 4.13, dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- 1) Nilai  $t_{hitung}$  variabel Kualitas SDM diperoleh sebesar 1.807 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1.68488, dan signifikan menunjukkan angka  $0.79 > 0.05$ . maka hipotesis (H1) yang diajukan ditolak. Hal ini berarti kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten Langkat pada taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ .
- 2) Nilai  $t_{hitung}$  variabel Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) diperoleh sebesar 3.429 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1.68488, dan signifikan  $0,001 < 0,05$ . maka hipotesis (H2) yang di ajukan dapat diterima. Hal ini berarti bahwa SPIP secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten Langkat pada taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ .

### c. Uji F

Uji f dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji f tercantum pada tabel 4.14.

Tabel 4.14. Hasil Uji F

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	149.771	2	74.885	26.955	.000 <sup>a</sup>
	Residual	108.349	39	2.778		
	Total	258.119	41			

a. Predictors: (Constant), Total\_X2, Total\_X1

b. Dependent Variable: Total\_Y

Berdasarkan tabel hasil uji diatas, nilai  $F_{hitung}$  26.955 lebih besar dari  $F_{tabel}$  3,24 dan signifikan 0,000 maka hipotesis (H3) yang diajukan diterima. Hal ini berarti semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ .

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Kualitas sumber daya manusia terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H1) disimpulkan bahwa Kualitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini mendukung studi yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan, yang dalam penelitiannya adalah variabel nilai informasi pelaporan keuangan.

Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya penyebaran kuisisioner yang tidak sesuai dengan jabatan yang dituju terbukti dari data demografi responden yang telah kembali kepada peneliti, setelah diolah ternyata sebesar 33.3% responden yang mengisi kuisisioner berada di jabatan

lainnya. Kemudian faktor lain mungkin terkait dengan kondisi kapasitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta mungkin ada juga penempatan posisi pada subbagian akuntansi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan sumber daya manusia yang dimiliki. Semakin sesuai pendidikan, pengalaman dan keahlian sumber daya manusia maka sumber daya manusia tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik dan lebih cepat. Temuan ini mendukung pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan sumber manusia yang berkualitas guna melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien.

## **2. Pengaruh Sistem pengendalian intern terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis H2 didapatkan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten Langkat. Hasil uji hipotesis ini sejalan dengan Zuliarti (2012) dan Ferawati (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa adanya sistem pengendalian intern pemerintah dapat memberikan peningkatan nilai pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil uji hipotesis H3 dapat disimpulkan bahwa Kualitas sumber daya manusia dan Sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai informasi pelaporan keuangan pada

seluruh dinas di kabupaten Langkat. Hasil ini dapat menyimpulkan bahwa apabila kualitas SDM dan SPIP secara bersama-sama terorganisir dengan baik, maka memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai karena disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh antara Kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten Langkat.
2. Terdapat pengaruh secara positif antara SPIP terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten Langkat.
3. Terdapat pengaruh positif secara simultan antara Kualitas SDM dan SPIP terhadap terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada seluruh dinas di kabupaten Langkat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan apa yang peneliti simpulkan dapat diajukan tiga saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya di masa mendatang agar dapat menambah metode survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada serta mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian rentan terhadap biasanya jawaban responden.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang berkaitan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan seperti pengawasan

keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah. Hal ini agar variasi turun naiknya nilai informasi pelaporan keuangan dapat lebih dijelaskan.

3. Bagi pemerintah kabupaten Langkat yang menjadi subjek dalam penelitian perlu memperhatikan sumber daya manusia. Penempatan posisi sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, memiliki pengalaman dan memiliki latar belakang akuntansi yang sesuai dengan *job description* sangat dibutuhkan agar dapat bekerja dengan efektif dan efisien yang akan berdampak pada nilai informasi pelaporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika, R. (2018). PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT ARTHA GITA SEJAHTERA MEDAN. JUMANT, 9(1), 95-103.
- Andika, R. (2018). Pengaruh Kemampuan Berwirausaha dan Kepribadian Terhadap Pengembangan Karir Individu Pada Member PT. Ifaria Gemilang (IFA) Depot Sumatera Jaya Medan. JUMANT, 8(2), 103-110.
- Andika, R. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja dan Persaingan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. JUMANT, 11(1), 189-206.
- Ardian, N. (2019). Pengaruh Insentif Berbasis Kinerja, Motivasi Kerja, Dan Kemampuan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai UNPAB. JEpa, 4(2), 119-132.
- Siregar, M. Y. (2019). PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN REMUNERASI TERHADAP PRESTASI KERJA MELALUI ETOS KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI. JUMANT, 11(1), 151-164.
- Siregar, N. (2018). ANALISIS PRODUK DAN CITRA KOPERASI TERHADAP WIRAUSAHA KOPERASI DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT DESA LUBUK SABAN PANTAI CERMIN KABUPATEN DELI SERDANG. JUMANT, 9(1), 79-93.
- Siregar, N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Menggunakan Indihome Sebagai Penyedia Jasa Internet Di Kota Medan (Studi Kasus Kantor Plaza Telkomcabang Iskandar Muda No. 35 Medan Baru). JUMANT, 7(1), 65-76.
- Siregar, N. (2018). Pengaruh Pencitraan, Kualitas Produk dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Kampoeng Deli Medan. JUMANT, 8(2), 87-96.
- Sujarweni. (2014). *Metode Penelitian:Lengkap, Praktis dan Mudah di Pahami*. Pustaka Baru Press.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Edisi 7.Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, R. (2018). ANALISA KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI CV. REZEKI MEDAN. JUMANT, 8(2), 97-102.

- Harahap, R. (2018). Pengaruh Kualitas produk Terhadap Kepuasan Pelanggan di Restoran Cepat saji Kfc Cabang Asia Mega Mas Medan. *JUMANT*, 7(1), 77-84.
- Harnoni. (2016). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi pada SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas*. *Jurnal Jom FeKON* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016.
- Rira Nuradhawati. (2019). *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*. *Jurnal Academia Praja* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.
- Setiawan, N. (2018). PERANAN PERSAINGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN (Resistensi Terhadap Transformasi Organisasional). *JUMANT*, 6(1), 57-63.
- Setiawan, N., Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Tambunan, A. R. S., Girsang, M., Agus, R. T. A., ... & Nisa, K. (2018). Simple additive weighting as decision support system for determining employees salary. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.14), 309-313.
- Harifan, Handriko. (2009). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Pemerintah Kota Padang*. Skripsi. Padang : Universitas Negeri Padang.
- Zuliarti. (2012). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Kudus : Universitas Muria Kudus.
- Galuh Dellano. (2012). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Informasi Pelaporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Padang : Universitas Negeri Padang.
- Ferawati Fajrin. (2012). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman). Kota Padang*. Padang : Universitas Negeri Padang.
- Mesra, B. (2019). IBU RUMAH TANGGA DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN KELUARGA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI SERDANG. *JUMANT*, 11(1), 139-150.
- Nasution, M. D. T. P., Rossanty, Y., Achmad Daengs, G. S., Sahat, S., Rosmawati, R., Kurniasih, N., ... & Rahim, R. (2018). Decision support rating system with Analytical Hierarchy Process method. *Int. J. Eng. Technol*, 7(2.3), 105-108.

Nasution, M. D. T. P., & Rossanty, Y. (2018). Country of origin as a moderator of halal label and purchase behaviour. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

[https://medan.bpk.go.id/?page\\_id=18530](https://medan.bpk.go.id/?page_id=18530)

<https://www.langkatkab.go.id>

<https://news.metro24jam.com/read/2016/11/24/2573>

<https://www.liputan6.com/news/read/348851/>

